

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Maqashid Syariah merupakan suatu konsep dalam Islam yang mengacu pada tujuan dan sasaran dasar hukum Islam. Konsep ini mencakup lima prinsip utama, yaitu melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, harta benda, dan lingkungan. *Maqashid al-Shari'ah*, yang biasa disebut sebagai tujuan syariah (hukum Islam), merupakan aspek integral dari hukum Islam. Hakikat *maqashid syariah* adalah kemaslahatan, yaitu memberikan perlindungan terhadap lima hal dasar, meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, harta benda, akal, dan keturunan. yang menyatakan bahwa hukum dalam hukum Islam bertujuan untuk mendidik individu (*tahdzib al-fard*), menegakkan keadilan (*iqamah al-'adl*) dan menciptakan kesejahteraan (*jalb al-maslahah*).¹ Konsep *Maqasid al-Shari'ah* kini banyak digunakan sebagai salah satu langkah utama dalam perumusan fatwa terkait bisnis syariah.²

Untuk mengevaluasi kinerja bank-bank Islam dalam kaitannya dengan konsep *maqashid syariah*, Muatafa Omar Mohammed, Dzuljastri Abdul Rozak, dan Fauziah MD Taib mengemukakan *Syariah Maqashid*

¹ Mustafa Omar Mohammed and Fauziah Mohammad Taib, "The Performance Measurement of Islamic Banking Based on the Maqasid Framework," *Islamic Financial Economy and Islamic Banking* 1967, no. June (2008): 94–113, <https://doi.org/10.4324/9781315590011-6>.

² Mutiara Solihat et al., "Maqashid Sharia-Based Pesantren Development Index," *Maqasid Al-Shariah Review* 2, no. 1 (2023): 2, <https://doi.org/10.58968/msr.v2i1.331>.

Indeks (SMI). Berdasarkan fakta bahwa perbankan Islam bertujuan untuk mengukur lebih dari sekadar kinerja keuangan, *Syariah Maqashid Indeks (SMI)* dikembangkan untuk mengatasi ketidaksesuaian indikator kinerja tradisional dengan perbankan Islam.³

Sebagai bagian dari upaya peningkatan kinerja secara keseluruhan, entitas Islam harus fokus pada pencapaian tujuan syariah yang tertuang dalam *maqashid syariah*. *Maqashid syariah* ditinjau dari tujuan hukum Islam yang tertuang dalam setiap aturannya. *Syariah Maqashid indeks* digunakan untuk mengukur *maqashid syariah* yang diterapkan pada entitas Islam dan merupakan alat bagi entitas Islam untuk mengukur kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam.⁴ Adapun operasionalisasi variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1. Variabel *Maqashid Sharia Index*

Tujuan Syariah	Dimensi	Elemen
<i>Tahfidz Al-Fard</i> (Mendidik Individu)	D1. Kemajuan Ilmu Pengetahuan	E1. Pendidikan
		E2. Penelitian
	D2. Menanamkan Keterampilan Baru	E3. Pelatihan
	D3. Menciptakan Kesadaran	E4. Publisitas
<i>Iqamah Al-Adl</i> (Mengakkan Keadilan)	D4. Transaksi yang adil	E5. Pengembalian yang adil
	D5. Produk dan Layanan terjangkau	E6. Harga Terjangkau
	D6. Penghapusan Ketidakadilan	E7. Produk bebas bunga

³ Musolli Musolli, "Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer," *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2018): 60–81, <https://doi.org/10.33650/at-turas.v5i1.324>.

⁴ Kautsar Riza Salman, "Antecedents and Consequences of Islamic Bank Performance Based on the Maqashid Sharia Index," *The Indonesian Accounting Review* 13, no. 1 (2023): 36, <https://doi.org/10.14414/tiar.v13i1.3015>.

<i>Jabl al Maslahah</i> (Menciptkan Kemaslahatan)	D7. Profitabilitas	E8. Rasio keuntungan
	D8. Redistribusi pendapatan dan kekayaan	E9. Personal income
	D9. Investasi pada sektor riil	E10. Rasio Investasi di sektor riil

Sumber : Muhammad & Razak 2008

Ekonomi Islam telah berkembang sangat pesat selama tiga dekade terakhir, baik dalam penelitian akademis maupun praktik bisnis di perguruan tinggi. Di Indonesia pun, pengembangan pembelajaran dan penerapan ekonomi Islam mengalami kemajuan pesat. Pembelajaran ekonomi Islam telah diajarkan di beberapa perguruan tinggi negeri dan swasta. Perkembangan ekonomi syariah mulai mendapatkan momentum sejak berdirinya Bank Muamalat pada tahun 1992.⁵

Sejumlah variabel, termasuk situasi ekonomi, politik, sosial, budaya, geografis, dan keamanan negara yang relatif stabil, serta keberadaan undang-undang dan peraturan khusus ekonomi Islam, kemungkinan berkontribusi terhadap pertumbuhan cepat ekonomi Islam di Indonesia.⁶ Bagian integral dari syariah, yang membentuk pandangan dunia dan banyak tujuan serta metode, adalah sistem ekonomi Islam, yang juga berfungsi sebagai titik acuan yang paling dapat diandalkan. Kehidupan yang layak, menurut ekonomi Islam, adalah kehidupan yang mengutamakan keadilan sosial dan ekonomi, pemenuhan kebutuhan

⁵ Nurrohman and Nurhaeti, "Pemikiran Ekonomi Islam Dalam Lintasan Sejarah," *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah* 1, no. 2 (2019): 225–32.

⁶ Erik Nugraha et al., "Maqashid Sharia Implementation in Indonesia and Bahrain," *Etikonomi* 19, no. 1 (2020): 156, <https://doi.org/10.15408/etk.v19i1.14655>.

spiritual manusia, dan persaudaraan, sebagaimana yang digariskan dalam ajaran Islam.⁷ Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) didirikan dengan landasan ekonomi Islam yang kuat. Misinya adalah meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat melalui pemberian pembiayaan kepada usaha kecil dan mikro. BPRS lahir dari kebutuhan akan layanan keuangan yang berpegang pada prinsip syariah. Selain berfungsi sebagai bank, BPRS juga berperan sebagai agen pemberdayaan ekonomi dengan mendukung pertumbuhan usaha kecil lokal.

Salah satu bank syariah yang beroperasi sesuai prinsip syariah adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Demografi Indonesia, negara muslim terbesar di dunia, memberikan kepercayaan pada gagasan bahwa perbankan syariah dapat berkembang pesat di tahun-tahun mendatang.⁸ Sementara kebijakan perbankan konvensional memberikan peluang untuk menentukan suku bunga-bunga yang merupakan riba oleh masyarakat muslim. BPRS didirikan sebagai langkah aktif dalam restrukturisasi ekonomi Indonesia, sebagaimana yang dituangkan dalam berbagai paket kebijakan keuangan, moneter, dan perbankan secara umum⁹. Salah satu tujuan utama pendirian bank syariah adalah memastikan bahwa semua transaksi keuangan mematuhi prinsip-prinsip

⁷ Naelul Azmi, "Problematika Sistem Ekonomi Islam Di Indonesia," *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 3, No. 1 (2020): 44–64, <https://doi.org/10.47971/Mjhi.V3i1.186>.

⁸ Himawan Pradipta, "Kajian Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Bprs) Di Kawasan Tapal Kuda," *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 7, No. 1 (2021): 77–94, <https://doi.org/10.36908/Isbank.V7i1.215>.

⁹ Mister Candra And Anggreany Hustia, "Pengaruh Pembiayaan Qardh, Ijarah Dan Istishna Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Bprs) Di Indonesia," *Jurnal Manajemen Dan Keuangan* 8, No. 1 (2019): 58–67, <https://doi.org/10.33059/Jmk.V8i1.1183>.

sistem ekonomi Islam, yang meliputi: 1. Larangan penuh bunga bank, yang juga dikenal sebagai riba, dalam semua transaksi keuangan. 2. Menetapkan sistem bagi hasil dalam usaha komersial yang menghasilkan pendapatan dan laba yang halal.¹⁰

Bagian integral dari syariah, yang membentuk pandangan dunia dan banyak tujuan serta metode, adalah sistem ekonomi islam, yang juga berfungsi sebagai titik acuan yang paling dapat diandalkan. Kehidupan yang layak, menurut ekonomi Islam, adalah kehidupan yang mengutamakan keadilan sosial dan ekonomi, pemenuhan kebutuhan spiritual manusia, dan persaudaraan, sebagaimana yang digariskan dalam ajaran Islam.¹¹ Lembaga keuangan Islam hadir sebagai wujud pengembangan aspirasi masyarakat yang menginginkan kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip syariah. Perbankan Islam memiliki lebih banyak peluang. Hal ini menjadi salah satu keunggulan perbankan Islam dalam menjawab tantangan perekonomian di Indonesia.¹² Pertumbuhan bank syariah seiring dengan tingginya pertumbuhan penduduk Indonesia merupakan sebuah keuntungan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 260 juta jiwa dengan mayoritas beragama Islam (di atas 80%) merupakan pangsa pasar bank

¹⁰ Listian Ahmad and Riana Puspitasari, "ANALISIS PENGARUH MODAL DAN RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN BANK MUAMALAT INDONESIA (Studi Kasus Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk)," *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 5, no. 2 (2020): 177, <https://doi.org/10.37366/jespb.v5i02.115>.

¹¹ Azmi, "Problematika Sistem Ekonomi Islam Di Indonesia."

¹² Jurnal Ekonomi Islam, D I Perbankan, and Syariah Di, "Instrumen Ekonomi Makro Pada Pembiayaan Di Perbankan Syariah Di Indonesia," *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2020): 1–15, <https://doi.org/10.56114/al-sharf.v1i1.23>.

syariah. Hal ini juga terutama didukung oleh meningkatnya kesadaran bahwa umat Islam beragama, termasuk dalam mengelola keuangannya.¹³ Melalui sektor perbankan, kegiatan perekonomian dapat dikelola dengan baik apabila dilakukan dengan cara yang benar.¹⁴

Berawal dari bank islam terkemuka di Indonesia, Bank Muamalat Indonesia telah memainkan peran penting dalam pengembangan ekonomi Islam di negara ini. Bank-bank baru bermunculan secara berkala sebagai hasil dari pesatnya ekspansi bank-bank Islam.¹⁵ Kedudukan Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah semakin mantap setelah Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disahkan.¹⁶ Setelah berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI), BPRS lainnya pun berdiri, dan terbukti perbankan syariah tidak terpengaruh oleh krisis moneter 1998. Akhirnya, bank-bank umum mulai membangun perbankan berbasis syariah.¹⁷

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dipilih untuk melihat apakah BPRS ini menjalankan kegiatan nya sesuai dengan syariah islam

¹³ Saiful Muchlis et al., "Financial Performance Analysis of Sharia Banking with Maqashid Shariah Index Method AKURASI 261," *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan* 4, no. 3 (2022): 262, <https://doi.org/10.36407/akurasi.v4i3.669>.

¹⁴ Muhamad Yusup and Dewi Sartika Nasution, "Implementation of the Maqashid Syariah Index Approach on the Performance of Sharia Regional Development Banks in Indonesia," *Journal of Finance and Islamic Banking* 3, no. 1 (2020): 22, <https://doi.org/10.22515/jfib.v3i1.1952>.

¹⁵ Dian Riyanti, Iskandar Ali Alam, and Defrizal, "Jurnal Manajemen Diversifikasi Jurnal Manajemen Diversifikasi," *Jurnal Manajemen* 1, no. 1 (2020): 1–11.

¹⁶ Rudi Hartono, "Laporan Sumber Dan Penggunaan Dana Kebajikan Bank Syariah (Studi Pada Bank Muamalat Indonesia)," *Budgeting: Jurnal Akuntansi Syariah* 3, no. 1 (2022): 50, <https://doi.org/10.32923/bdg.v3i1.2737>.

¹⁷ Suryani Suryani, "Sistem Perbankan Islam Di Indonesia: Sejarah Dan Prospek Pengembangan," *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 3, no. 1 (2012): 111, <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v3i1.111-131>.

yang tidak hanya tertuju pada keuntungan semata dan memberikan manfaat pada lingkungan sekitar, pulau jawa memiliki konsentrasi BPRS tinggi dibandingkan dengan wilayah lainnya dindonesia, yang menjadikannya lokasi ideal untuk peneliti, pulau jawa juga merupakan pusat ekonomi di Indonesia, Angka terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia menunjukkan bahwa bahkan pada kuartal ketiga tahun 2024, Pulau Jawa masih menjadi pusat perekonomian negara ini. Sebanyak 56,84% PDB negara ini berasal dari Jawa.¹⁸

Pulau Jawa terus membentuk struktur ekonomi Indonesia, menyumbang 56,48 persen dari PDB negara ini dan mengalami tingkat pertumbuhan kumulatif sebesar 5,31%. Empat provinsi terbesar di Pulau Jawa DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah memberikan kontribusi gabungan sebesar 51,71 persen terhadap pertumbuhan ekonomi pulau tersebut.¹⁹ Pemilihan BPRS disini diharap memberikan wawasan tentang kontribusi lembaga ini terhadap perekonomian lokal.

Berawal dari bank Islam terkemuka di Indonesia, Bank Muamalat Indonesia telah memainkan peran penting dalam pengembangan ekonomi

¹⁸ Wilhelmina Alexandra Valmay Putri Aberth: Kontribusi Pulau Jawa terhadap Perekonomian Indonesia Capai Lebih dari 50% [Berita Online GoodStats 18, NOVEMBER 2024 PUKUL 10.00], tersedia di situs: <https://data.goodstats.id/statistic/kontribusi-pulau-jawa-terhadap-perekonomian-indonesia-capai-lebih-dari-50-Beaat>, diakses pada tanggal 09 Desember 2024, Pukul 16.39 wib.

¹⁹ Nada Naurah: Perekonomian Nasional Masih Didominasi Jawa, Kontribusinya Capai 56,48% Pada 2022 [Berita Online GoodStats 2 MARET 2023 PUKUL 17.00], tersedia di situs: <https://goodstats.id/article/perekonomian-nasional-masih-didominasi-jawa-kontribusinya-capai-56-48-pada-2022-6hIRY>, diakses pada tanggal 09 Desember 2024, Pukul 16.46 wib.

Islam di negara ini. Bank-bank baru bermunculan secara berkala sebagai hasil dari pesatnya ekspansi bank-bank Islam.²⁰ Law No. 7 of 1992 regulating Banking solidified Bank Muamalat Indonesia's status as a sharia bank.²¹ Setelah berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI), BPRS lainnya pun berdiri, dan terbukti perbankan syariah tidak terpengaruh oleh krisis moneter 1998. Akhirnya, bank-bank umum mulai membangun perbankan berbasis syariah.²²

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dipilih untuk melihat apakah BPRS ini menjalankan kegiatan nya sesuai dengan syariah islam yang tidak hanya tertuju pada keuntungan semata dan memberikan manfaat pada lingkungan sekitar, pulau jawa memiliki konsentrasi BPRS tinggi dibandingkan dengan wilayah lainnya dindonesia, yang menjadikannya lokasi ideal untuk peneliti, pulau jawa juga merupakan pusat ekonomi di Indonesia, Angka terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia menunjukkan bahwa bahkan pada kuartal ketiga tahun 2024, Pulau Jawa masih menjadi pusat perekonomian negara ini. Sebanyak 56,84% PDB negara ini berasal dari Jawa.²³ Pulau Jawa terus membentuk struktur ekonomi Indonesia, menyumbang 56,48 persen dari PDB negara

²⁰ Riyanti, Iskandar Ali Alam, and Defrizal, "Jurnal Manajemen Diversifikasi Jurnal Manajemen Diversifikasi."

²¹ Hartono, "Laporan Sumber Dan Penggunaan Dana Kebajikan Bank Syariah (Studi Pada Bank Muamalat Indonesia)," 50.

²² Suryani, "Sistem Perbankan Islam Di Indonesia: Sejarah Dan Prospek Pengembangan."

²³ Wilhelmina Alexandra Valmay Putri Aberth: Kontribusi Pulau Jawa terhadap Perekonomian Indonesia Capai Lebih dari 50% [Berita Online GoodStats 18, NOVEMBER 2024 PUKUL 10.00], tersedia di situs: <https://data.goodstats.id/statistic/kontribusi-pulau-jawa-terhadap-perekonomian-indonesia-capai-lebih-dari-50-Beaat>, diakses pada tanggal 09 Desember 2024, Pukul 16.39 wib.

ini dan mengalami tingkat pertumbuhan kumulatif sebesar 5,31%. Empat provinsi terbesar di Pulau Jawa DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah memberikan kontribusi gabungan sebesar 51,71 persen terhadap pertumbuhan ekonomi pulau tersebut.²⁴ Pemilihan BPRS disini diharap memberikan wawasan tentang kontribusi lembaga ini terhadap perekonomian lokal.

Tabel 1.2. BPRS di Pulau Jawa

NO	NAMA BPRS	KAB/KOTA
1	Amanah Ummah	Kab. Bogor
2	Harta Insan Karimah	Kota Tangerang
3	Harta Insan Karimah Cibitung	Kota Bekasi
4	Muamalah Cilegon	Kota Cilegon
5	Attaqwa	Kab. Tangerang
6	Wakalumi	Kab. Tangerang
7	Albarokah	Kota Depok
8	Mulia Berkah Abadi	Kota Tangerang Selatan
9	Botani Bina Rahmah	Kab. Bogor
10	Al Hijrah Amanah	Kota Depok
11	Amanah Insani	Kota Bekasi
12	Harta Insan Karimah Insan Cita	Kota Depok
13	Berkah Ramadhan	Kab. Tangerang
14	Cilegon Mandiri	Kota Cilegon
15	Artha Madani	Kota Bekasi
16	Al Salaam Amal Salman	Kota Depok
17	Patriot Bekasi	Kota Bekasi
18	Hijra Alami	Wil. Kota Jakarta Selatan
19	Bogor Tegar Beriman	Kab. Bogor

²⁴ Nada Naurah: Perekonomian Nasional Masih Didominasi Jawa, Kontribusinya Capai 56,48% Pada 2022 [Berita Online GoodStats 2 MARET 2023 PUKUL 17.00], tersedia di situs: <https://goodstats.id/article/perekonomian-nasional-masih-didominasi-jawa-kontribusinya-capai-56-48-pada-2022-6hIRY>, diakses pada tanggal 09 Desember 2024, Pukul 16.46 wib.

20	Rizky Barokah	Kota Tangerang Selatan
21	Amanah Rabbaniah	Kab. Bandung
22	Baiturridha Pusaka	Kota Bandung
23	Almasoem	Kab. Bandung
24	Daarul Hayat	Kota Bandung
25	Gaido Indonesia	Kab. Cianjur
26	Al Ihsan	Kab. Bandung
27	Harta Insan Karimah Parahyangan	Kab. Bandung
28	Pnm Mentari	Kab. Garut
29	Almadinah Tasikmalaya Perseroda	Kota Tasikmalaya
30	Gala Mitra Abadi	Kab. Grobogan
31	Asad Alif	Kab. Kendal
32	Artha Surya Barokah	Kota Semarang
	Artha Mas Abadi	Kab. Pati
33	Bina Finansia	Kota Semarang
34	Artha Amanah Ummat	Kab. Semarang
35	Meru Nusantara Mandiri	Kab. Magelang
36	Kedung Arto	Kota Semarang
37	Buana Mitra Perwira	Kab. Purbalingga
38	Suriyah	Kab. Cilacap
39	Bina Amanah Satria	Kab. Banyumas
40	Hik Jateng	Kab. Banyumas
41	Arta Leksana	Kab. Banyumas
42	Bumi Artha Sampang	Kab. Cilacap
43	Gunung Slamet	Kab. Cilacap
44	Bangun Arta	Kab. Cilacap
45	Dana Mulia	Kota Surakarta/Solo
46	Sukowati Sragen	Kab. Sragen
47	Dana Amanah Surakarta	Kota Surakarta/Solo
48	Almabrur Klaten	Kab. Klaten
49	Insan Madani	Kab. Sukoharjo
50	Dharma Kuwera	Kab. Klaten
51	Hikmah Khazanah	Kota Surakarta/Solo
52	Hikmah Bahari	Kota Tegal
53	Rahma Syariah	Kab. Kediri
54	Magetan (Perseroda)	Kab. Magetan
55	Artha Sinar Sejahtera Syariah	Kota Batu
56	Bumi Rinjani Kepanjen	Kab. Malang

57	Baktimakmur Indah	Kab. Sidoarjo
58	Amanah Sejahtera	Kab. Gresik
59	Bhakti Sumekar Perseroda	Kab. Sumenep
60	Lantabur Tebuireng	Kab. Jombang
61	Sarana Prima Mandiri	Kab. Pamekasan
62	Annisa Mukti	Kab. Sidoarjo
63	Madinah	Kab. Lamongan
64	Unawi Barokah	Kab. Sidoarjo
65	Dana Hidayatullah	Kota Yogyakarta
66	Barokah Dana Sejahtera	Kota Yogyakarta
67	Mitra Amal Mulia	Kab. Sleman
68	Madina Mandiri Sejahtera	Kab. Bantul
69	Harta Insan Karimah Mitra Cahaya Indonesia	Kab. Sleman
70	Cahaya Hidup	Kab. Sleman
71	Unisia Insan Indonesia	Kota Yogyakarta
72	Sleman (Perseroda)	Kab. Sleman

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan tahun 2023

Tabel di atas merupakan beberapa nama BPRS yang beroperasi di pulau Jawa, yang mencakup nama bank dan lokasi dari BPRS tersebut. BPRS berfungsi sebagai lembaga keuangan yang berbasis syariah. BPRS di fungsikan untuk dapat membantu masyarakat yang khusus nya pelaku usaha kecil dan menengah yang diharapkan dapat membantu dalam mengembangkan bisnis dari pelaku usaha tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Maqashid Sharia Index* yang dimana *MSI* ini menekankan pada pencapaian tujuan utama syariah, yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, harta dan lingkungan hidup. Pendekatan ini diharapkan dapat membantu dalam mengevaluasi kinerja lembaga keuangan berdasarkan nilai-nilai syariah. *MSI* juga memberikan kerangka *holistic* untuk menilai dampak sosial ekonomi dari

lembaga keuangan, tidak hanya dari segi *profitabilitas*, tetapi juga dilihat dari segi kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat yang dimana diharapkan dengan menggunakan pendekatan *MSI* lembaga keuangan dapat menunjukan komitmen mereka terhadap prinsip syariah dan transparansi dalam operasional. Pendekatan *Maqashid Sharia Index* memungkinkan pengukuran kinerja lembaga keuangan syariah berdasarkan nilai-nilai etika dan moral, dengan pendekatan *MSI* membantu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya tujuan syariah di kalangan pengelolaan lembaga keuangan syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis merasa perlu melakukan penelitian dengan menganalisis kinerja BPRS dengan melihat seberapa besar tingkat pencapaian masalah (kesejahteraan) dalam *maqashid sharia* jika ditinjau dari ketiga aspek yakni pendidikan, penciptaan keadilan, pencapaian kesejahteraan pada BPRS. Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni lebih memfokuskan lagi pada objek penelitian pada BPRS yang berada di pulau jawa yang dimana belum ada penelitian mengenai penerapan *Maqashid Sharia index (MSI)* pada BPRS di pulau jawa, sejauh ini masih banyak dilakukan di Bank Umum Syariah maupun Bank Umum Konvensional. Perbedaan lainnya adalah periode yang digunakan pada penelitian ini adalah tahun 2023. Sehingga penelitian mengambil judul **“ANALISIS KINERJA KEUANGAN BANK**

PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH DI PULAU JAWA DENGAN PENDEKATAN MAQASHID SHARIA INDEX”

B. Indentifikasi Masalah

Seiring dengan meningkatnya lembaga keuangan syariah dengan begitu cepat maka sangat diperlukan adanya fatwa fatwa hukum syariah yang lebih akurat dan valid. oleh sebab itu Dewan Syariah Nasional dalam merumuskan bentuk bentuk kegiatan keuangan yang islami terlihat menempuh dua cara dengan cara yang saling terhubung. Yang mana salah satunya mengislami kegiatan produk perbankan yang konvensional dengan menghilangkan unsur unsur yang dilarang oleh agama kemudian menggantinya dengan praktik yang tidak dilarang oleh agama yang memunculkan permasalahan tentang keabsahan dan eksistensi pada fatwa itu sendiri. Penulis mengidentifikasi permasalahan yang diakibatkan oleh antara lain:

1. Alokasi dana untuk pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan bank syariah masih bersifat fluktuatif. Bahkan, alokasi dana untuk penelitian, pengembangan syariah masih sangat minim. Padahal alokasi dana tersebut sangat penting untuk dapat memenuhi nilai nilai syariah.²⁵

²⁵ Salah Alhammadi, Khaled O. Alotaibi, and Dzikri F. Hakam, “Analysing Islamic Banking Ethical Performance from Maqāṣid Al-Sharī‘ah Perspective: Evidence from Indonesia,” *Journal of Sustainable Finance and Investment* 12, no. 4 (2022): 1171–93, <https://doi.org/10.1080/20430795.2020.1848179>.

2. Memastikan tujuan dari pendirian BPRS sudah sesuai dengan maqashid syariah, maka dibutuhkan peneilain kinerja secara khusus berdasarkan *maqashid sharia index*
3. Pengukuran kinerja keuangan dengan tolak ukur konvensional tidak cukup untuk mengukur kinerja bank syariah karena karakteristik produk yang dihasilkan berbeda.²⁶
4. Penelitian terkait dengan kinerja bank syariah dalam perspektif maqashid syaria cenderung jarang dilakukan dibandingkan pengukuran kinerja menggunakan tolak ukur konvensional.²⁷

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan beberapa masalah yang ingin dibahas, antara lain:

1. Bagaimana kinerja keuangan BPRS di pulau jawa ditinjau dari pendidikan individu pada tahun 2023?
2. Bagaimana kinerja keuangan bank BPRS di pulau jawa ditinjau dari menegakkan keadilan pada tahun 2023?
3. Bagaimana kinerja keuangan BPRS di pulau jawa ditinjau dari tujuan mencapai kesejahteraan pada tahun 2023?
4. Bagaimana kinerja keuangan BPRS di pulau jawa dengan menggunakan pendekatan *Indeks Maqashid Syariah* pada tahun 2023?

²⁶Alhammadi, Alotaibi, and Hakam.

²⁷Wahyuniati Hamid et al., "The Effect of Al-Bai' and Wadiah Contracts on Sharia Compliance and the Sharia Banking System Performance through the Maqashid Index in Sharia Banks in Indonesia," *Banks and Bank Systems* 14, no. 4 (2019): 104–13, [https://doi.org/10.21511/bbs.14\(4\).2019.10](https://doi.org/10.21511/bbs.14(4).2019.10).

D. Batasan Masalah

Maka perlu dilakukan pembatasan terhadap masalah untuk menghindari ruang lingkup pembahasan yang terlalu luas, maka penulis membatasi pembahasan yang akan diteliti pada penelitian ini adalah:

1. BPRS yang berada di pulau jawa untuk diteliti oleh peneliti
2. BPRS yang mengeluarkan laporan tahunan 2023

E. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis kinerja keuangan BPRS di pulau jawa berdasarkan tujuan pendidikan individu pada tahun 2023.
2. Menganalisis kinerja keuangan BPRS di pulau jawa berdasarkan tujuan menciptakan keadilan pada tahun 2023
3. Menganalisis kinerja keuangan BPRS di pulau jawa berdasarkan tujuan meningkatkan kesejahteraan pada tahun 2023
4. Menganalisis kinerja keuangan BPRS di pulau jawa dengan menggunakan pendekatan *Indeks Maqashid Syariah* pada tahun 2023

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait di antara lain: pengelola bank, pemangku kepentingan terkait dan akademisi

1. Bagi manajer bank

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi internal terhadap kinerja keuangan perusahaan agar tidak lagi mengacu pada pengukuran yang biasa diterapkan pada perbankan konvensional. Komitmen yang kuat dalam menjalankan bisnis sesuai maqashid syariah dapat menjadi semangat baru dan meningkatkan keunggulan kompetitif dan pangsa pasar perbankan syariah di tengah pesatnya pertumbuhan ekonomi global.

2. Bagi pemangku kepentingan terkait

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi baru bagi nasabah dan investor mengenai *Indeks Maqashid Syariah* sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap seluruh operasional bisnis perbankan. Penelitian ini juga diharapkan dapat mendorong pemerintah untuk mengeluarkan instruksi dan peraturan melalui Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar perbankan syariah di Tanah Air semakin kokoh.

3. Bagi akademisi

hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan literasi keuangan syariah di kalangan akademisi/cendekiawan muslim sehingga dapat menjadi stimulus untuk melakukan penelitian lebih lanjut di bidang ekonomi dan keuangan syariah.

G. Sistematika Penelitian

Untuk memudahkan penulis dalam penyusunan proposal ini, maka dibuatlah sistematika penulisan proposal yang terdiri atas 5 bab, dimana masing-masing bab terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusa masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisikan mengenai penjelasan tentang deskripsi teori terkait BPRS, *Maqashid Sharia*, *Maqashid Sharia Index*, penelitian yang relevan, kerangka berfikir, dan rumusan hipotesis.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, definisi operasional dan skala pengukuran.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang deskriptif objek penelitian, analisis data dan pembahasan penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan, implikasi serta saran terkait pengaruh latar belakang.



UIN IMAM BONJOL
PADANG